

**POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP  
TINDAK PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA  
MOTOR BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai  
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Utama : Hukum & Kebijakan Publik



Disusun Oleh :  
**SRI SUJIYANTA**  
**NIM : S310905014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2015**

**POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK  
PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR  
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001**

Disusun Oleh :

**SRI SUJIYANTA**

NIM : S310905014

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH. MH</u> NIM. 19602091988031003		.....
2. Pembimbing II	<u>Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH. MH</u> NIP. 197210082005012001		7/1/2016

Mengetahui

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum



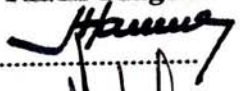



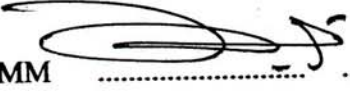
Dr. Hari Puwadi, SH, M. Hum  
NIP. 196412012005011001

**POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK  
PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR  
BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2001**

DISUSUN OLEH :


**SRI SUJIYANTA**  
NIM : S310905014

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji	Prof.Dr.Hartiwiningsih, SH.M.Hum NIP. 195702031985032001		5/1-2016
Sekretaris Penguji	Dr. Hari.Purwadi, SH.M.Hum NIP . 196412012005011001		
Anggota	Dr. Widodo Tresno Novianto, SH.M.Hum NIP. 195411241985031002		
Anggota	Prof. Dr. Adi Sulistiyono. SH.MH NIP. 19602091988031003		
Anggota	Dr.I.Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH.MM NIP. 197210082005012001		7/1/2016

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



**Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd**  
NIP.196007271987021001

Kepala Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hari Purwadi, SH, M. Hum**  
NIP. 196412012005011001

## **PERNYATAAN**

**Nama : Sri Sujiyanta**

**NIM : S310905014**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis berjudul “POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2001” adalah karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Oktober 2016  
Yang membuat pernyataan

A large, bold, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

**SRI SUJIYANTA**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Wr.Wb. puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhana wata'ala, Rabb yang mengajarkan manusia dengal qolam dan memulai pengetahuan bagi manusia dengan iqra. Semoga rachmad dan hidaya kebaikan-Nya senantiasa mencerahkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan dan penelitian ini. Allah maha besar dengan segala ciptaan-Nya, yang tidak semua diketahui manusia kecuali dengan ilmu. Maka sungguh Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi berilmu.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini berjudul POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2001. Diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan hukum, yaitu hukum pidana dalam kebijakan publik, khususnya di Kabupaten Sekoharjo.

Keberhasilan dalam penelitian dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Puji syukur kepada Allah Subhana Wata'ala yang menganugraahkan segala daya keikhlasan dan kesabaran.
2. Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi panutan intelektual dan perilaku penulis dan manusia pada umumnya.
3. Almarhum H. Dullah Umar Siswoharjono dan Hj. Samsinem Dullah Umar Siswoharjono beserta kedua almarhum dan almarhumah mertua yang telah mendidik dan mendo'akan keberhasilan penelitian dan penulisan ini.
4. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta
5. Prof. Dr.M.Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana
6. Dr. Hari Purwadi, SH,M.Hum selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum

7. Prof. Dr. Adi Sulistiyono. SH.MH dan Dr.I.Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH.MM yang telah setia memberikan bimbingan kepada penulis selama penelitian dan penulisan
  8. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH. M.Hum, Dr. Hari Purwadi, SH, M.Hum beserta Dr. Widodo Tresno Novianto, SH. M.Hum yang berkenan meluangkan waktu menjadi penguji dalam sidang tesis ini.
  9. Istri ku tersayang Rini Yuliasuti, SE dan ketiga anak ku Jati Panuntun Wikan Pribadi, Akbar Bella Sekar Panuntun dan Garuda Pangasuh Bayu Samudera adalah anugerah dan penyemangat selama studi, penelitian dan penulisan tesis ini.
  10. Seluruh koresponden yang telah bekerjasama memberikan data dan informasi untuk penulisan tesis ini.
  11. Para dosen pengajar program studi Magister Ilmu Hukum FH. UNS atas ilmu yang diberikan.
  12. Para staf program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum FH. UNS atas pelayanan yang diberikan.
- Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca dapat menyempurnakan tesis ini kedepan. Atas saran dan kritik yang membangun, penulis mengucapkan terimakasih. *Wassalamualaikum Wr...Wb...*

Surakarta, Oktober 2016

Yang membuat pernyataan

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller loops and a long horizontal stroke ending in a small hook.

SRI SUJIYANTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRAC .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II    TINJAUAN TEORITIK DAN KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Politik Hukum .....	14
B. Hukum Pembalikan Beban Pembuktian.....	32
C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian. ....	63
D. Korupsi di Dalam Kebijakan Publik.....	69
E. Penelitian Yang Relevan .....	74
F. Kerangka Pemikiran .....	87
BAB III    METODE PENELITIAN .....	96
A. Jenis dan Desain Penelitian .....	96
B. Tempat Penelitian .....	96

C. Sumber Data dan Koresponden .....	97
D. Teknik Pengumpulan Data .....	98
E. Teknik Analisis Data .....	100
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	103
A. Gambaran Perkara .....	103
B. Politik Hukum Korupsi APBD Kabupaten Sukoharjo .....	110
C. Analisis Pembalikan Beban Pembuktian.....	117
D. Upaya Hukum Lanjutan .....	125
E. Hambatan dan Kendala Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian .....	155
BAB V KESIMPULAN .....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Implikasi .....	164
C. Saran – Saran.....	154

#### DAFTAR PUSTAKA



## **ABSTRAK**

Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena memberikan kewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebut berakibat terhadap sikap moral dan kompetensi management pemerintah. Politik hukum adalah kebijakan, situasi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pembalikan beban pembuktian untuk mengakses uang dan kekayaan negara yang dikorupsi. Tetapi proses pembalikan beban pembuktian selama ini belum berjalan karena tidak dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang memfasilitasi penanganan pidana khusus. Bagaimana upaya politik hukum agar pembalikan beban pembuktian menjadi salah satu instrument pemberantasan korupsi yang efektif.

Penelitian ini adalah jenis juridis empirik, melihat kenyataan hukum dari sudut pandang soaial politik. Sumber data primer adalah wawancara, dokumen kasus. Sedangkan dokumen sekunder adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen kebijakan teknis, peraturan perundang-undangan. Analisis sistem trigulasi untuk mengambil fakta-fakta penanganan pidana korupsi kemudian dikomparasikan dengan peraturan formil.

Penerapan pembalikan beban pembuktian sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli hukum dan praktisi, karena tidak terakomodirnya dalam suatu sistem hukum yang memadai. Seperti halnya hukum acara tentang bagaimana seharusnya pembalikan beban pembuktian tersebut dilakukan dalam proses persidangan.

Kata kunci : korupsi, politik hukum, pembalikan beban pembuktian

## **ABSTRACT**

*Political decentralization led to corruption in the region, because it gives the authority to the head of local government to manage the budget. Undermine the authority of the moral attitude and competence of government management. Law politics are social situations that affect the birth and the implementation of the law. Reversal of the burden of proof to access to money and wealth of the country is corrupt. But the reversal of the burden of proof has not been running for is not equipped with a special criminal procedure which facilitates the handling of specific criminal. How the political efforts that the law of proof to be one of the effective anti-corruption instrument.*

*This research is a kind of juridical empirical, the fact the legal from the standpoint of socialist politics. The primary data sources are interviews, document cases. While the secondary documents are books, journals, research, technical policy documents, legislation. Analysis trigulasi system to take the facts of the handling of corruption then dikomparasikan formal regulations.*

*Reversal of the burden of proof in corruption in the practice was contrary to the Criminal Procedure Code. Reversal of the burden of proof in Indonesia only written, but not maximal implemented, since the detection of the wealth of the State money has been made through the usual verification mechanism. Government and parliament deliberately slow down the writing of specific criminal Criminal Procedure Code, and make changes to the KPK and the Corruption Act, the political spirit of the law is bad.*

*Keywords: corruption, legal politics, a reversal of the burden of proof*